



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 549244

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 645.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/105 m2 di KAB / KOTA PASER, Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/48 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 28.500.000

1. MOTOR, HONDA NC11B1A/T BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA ACF1L21B06AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA X1HQ2N32LL1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 159.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 152.012.605

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 985.012.605

**III. HUTANG** Rp. 420.370.894

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 564.641.711



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.